



# Rencana Strategis

Pusat  
Penguatan  
Karakter

2020-2024

REVISI 2023

Kementerian Pendidikan  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR ISTILAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum Pendidikan Karakter.....	1
C. Isu Permasalahan Penguatan Karakter di Indonesia.....	2
D. Tantangan Penguatan Karakter di Indonesia.....	8
<b>1. Tantangan Pendidikan dan Kebudayaan di Masa Mendatang.....</b>	<b>8</b>
<b>2. Disrupsi Teknologi Akan Berdampak Pada Semua Sektor.....</b>	<b>10</b>
<b>3. Perubahan Kehidupan Sosiokultural.....</b>	<b>12</b>
<b>4. Penguatan Karakter Pada Generasi Z dan Alpha serta Tantangan ke Depan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....</b>	<b>15</b>
A. Visi.....	15
B. Misi.....	15
C. Tujuan.....	16
D. Perspektif Kebijakan.....	16
<b>1. Perspektif Tujuan (Profil Pelajar Pancasila).....</b>	<b>16</b>
<b>2. Perspektif Cara (Merdeka Belajar).....</b>	<b>17</b>
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>20</b>
A. ARAH KEBIJAKAN.....	20
B. STRATEGI.....	21
<b>1. Kampanye Komunikasi Publik.....</b>	<b>22</b>
<b>2. Pemberdayaan Ekosistem Pendidikan.....</b>	<b>26</b>
C. KERANGKA REGULASI.....	29
D. KERANGKA KELEMBAGAAAN.....	29
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN TARGET PENDANAAN.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>35</b>
<b>Matrik Target Kinerja Program/Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Renstra Kemendikbud 2020-2024.....</b>	<b>36</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Isu Prioritas Penguatan Karakter Kemendikbud .....	2
Gambar 2. Kondisi Toleransi di Indonesia .....	4
Gambar 3. Prevalensi Perundungan di Indonesia .....	5
Gambar 4. Masa Depan Pembelajaran .....	8
Gambar 5. Teknologi Semakin Murah .....	11
Gambar 6. Klasifikasi Generasi (William H. Frey) .....	13
Gambar 7. Komposisi Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan Klasifikasi Generasi (BPS, 2021) .....	14
Gambar 8. Dimensi-Dimensi Profil Pelajar Pancasila .....	17
Gambar 9. Pendekatan Komunikasi Publik .....	22
Gambar 10. Sinergi PUSPEKA dengan K/L dan Orsosmas .....	26
Gambar 11. Jalinan Kemitraan Tripusat Pendidikan .....	27
Gambar 12. Struktur Organisasi Pusat Penguatan Karakter .....	30
Gambar 13. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) PUSPEKA .....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tantangan Memajukan Pendidikan .....	9
Tabel 2. Tantangan Memajukan Kebudayaan .....	10
Tabel 3. Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sasaran Strategis .....	16
Tabel 4. Indikator Tahapan Penguatan Karakter .....	22
Tabel 5. Strategi Implementasi Profil Pelajar Pancasila .....	28
Tabel 6. Strategi Implementasi Penuntasan 3 Dosa Besar .....	28
Tabel 7. Strategi Implementasi Inklusifitas dan Kebinekaan .....	29
Tabel 8. Arah dan Kebutuhan Regulasi Pusat Penguatan Karakter .....	29
Tabel 9. Tugas dan Fungsi Kelompok di Pusat Penguatan Karakter .....	30
Tabel 10. Indikator Kinerja Pusat Penguatan Karakter Tahun 2021-2024 .....	32
Tabel 11. Indikator Kinerja Pusast Penguatan Karakter Tahun 2020-2024 .....	32
Tabel 12. Perencanaan Anggaran Penguatan Karakter di PUSPEKA .....	34

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perubahan Tenaga Kerja Akibat Perkembangan Teknologi .....	12
Grafik 2. Perubahan Kebutuhan Keterampilan Tenaga Kerja .....	12



## DAFTAR ISTILAH

- 4S** Senyum, Sapa, Sopan dan Santun  
**AKSI** Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia  
**AKM** Asesmen Kompetensi Minimum  
**APBN** Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
**ASN** Aparatur Sipil Negara  
**BMN** Barang Milik Negara  
**IKK** Indikator Kinerja Kegiatan  
**IKP** Indikator Kinerja Program  
**IKSS** Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
**K/L** Kementerian/Lembaga  
**Kemendikbud** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
**LAKIP** Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ‘  
**LK** Laporan Keuangan  
**Mendikbud** Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
**OECD** Organization for Economic Cooperation and Development  
**OPD** Organisasi Perangkat Daerah  
**Pemda** Pemerintah Daerah  
**Permendikbud** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
**Perpres** Peraturan Presiden  
**PISA** Programme for International Student Assessment  
**PNS** Pegawai Negeri Sipil  
**PP** Peraturan Pemerintah  
**PPK** Penguatan Pendidikan Karakter  
**RB** Reformasi Birokrasi  
**Renja** Rencana Kerja  
**Renstra** Rencana Strategis  
**RKA** Rencana Kerja dan Anggaran  
**RKA-KL** Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga  
**RPJMN** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  
**RPJPN** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
**SAKIP** Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
**Satker** Satuan Kerja  
**SDM** Sumber Daya Manusia  
**SK** Sasaran Kegiatan  
**SP** Sasaran Program  
**SS** Sasaran Strategis  
**TIK** Teknologi Informasi dan Komunikasi  
**UPT** Unit Pelaksana Teknis  
**UU** Undang-Undang  
**UUD** Undang-Undang Dasar  
**WBBM** Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani  
**WBK** Wilayah Bebas dari Korupsi  
**WTP** Wajar Tanpa Pengecualian  
**ZI** Zona Integritas



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penguatan Karakter Tahun 2020-2024 disusun mengacu kepada (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2005-2025, (c) Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020, (d) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor 11 tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, (e) Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (f) Renstra Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek Tahun 2020-2024.

Renstra ini akan menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun: (1) Perjanjian Kinerja; (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT); (3) Program dan kegiatan Pusat Penguatan Karakter secara terstruktur dan terarah; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Pusat Penguatan Karakter; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain itu, Renstra ini menyajikan sasaran dan target serta strategi pencapaiannya yang dilakukan melalui peningkatan mutu dan akses layanan penguatan karakter yang didukung dengan kerangka implementasi dan perkiraan kebutuhan biaya penyelenggaraan penguatan karakter dalam kurun waktu 2020-2024, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian program untuk penjaminan mutu dan memastikan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Jakarta, Juli 2023

Kepala Pusat Penguatan Karakter,



Rozaria Putri Ioanni, SE, MA  
NIP. 198309052009122005



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

“... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”

(Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945)

Pembukaan UUD 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan oleh Pembukaan UUD 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045. Visi ini terdiri dari empat pilar pembangunan berfondasikan Pancasila, yaitu:

- pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- perkembangan ekonomi berkelanjutan,
- pemerataan pembangunan, dan
- ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawa Cita dalam berbagai program kerja prioritas Kementerian, seperti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud periode 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

### B. Kondisi Umum Pendidikan Karakter

Pelaksanaan kebijakan program penguatan karakter ini dinilai positif oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan tingginya nilai survei kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh beberapa pihak, diantaranya:

1. Survei Litbang Kompas tahun 2017 di 14 kota besar di Indonesia: Sebanyak 84,90% masyarakat yakin bahwa Penguatan Pendidikan Karakter dapat meningkatkan kompetensi peserta didik. Survei di 14 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Ambon, dan Denpasar. (sumber Litbang Kompas 2017)
2. Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Kebijakan PPK, Survei Kepuasan Pelanggan *Stakeholder Satisfaction Survey* (SSS) Tahun 2018 oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemdikbud. Sebanyak 85,34% berbagai pemangku kepentingan pendidikan puas dengan adanya kebijakan PPK khususnya terhadap pembiasaan 5 nilai utama PPK yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. (sumber BKLM Kemdikbud 2018).
3. Survey yang dilakukan oleh Puspendik Kemendikbud terhadap peserta didik (sumber LAKIP Kemdikbud 2017) diperoleh data:

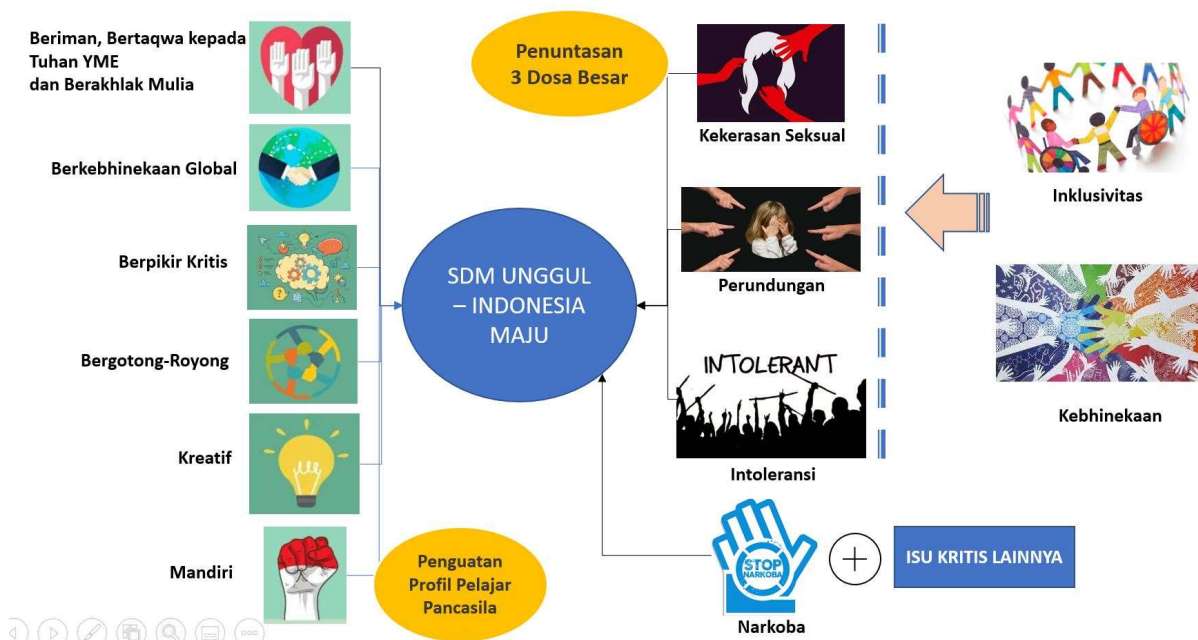


1. “Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD” dimana, perilaku positif siswa dilihat dari penanaman perilaku budi pekerti yang sangat mudah dilakukan pada usia dini. Survey dilakukan dengan menggunakan instrumen Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) dan sistem yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan anak di Indonesia secara utuh.
2. “Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK” diukur dengan tingkat kejujuran pelaksanaan ujian nasional. Untuk tahun 2017 indeks integritas siswa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk tingkat SMP/SMPLB dari yang ditargetkan sebesar 72% berhasil terealisasi sebesar 79,69%.
3. Sedangkan jenjang SMA/SMALB/SMK dari target yang ditetapkan sebesar 74% baru berhasil terealisasi sebesar 73,12% (SMA) dan 67,73% (SMK).
4. “Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM” realisasi capaiannya telah mencapai target. Keberhasilan pencapaian tersebut, tidak terlepas dari program/kegiatan yang dijalankan oleh Kemendikbud. Salah satu program yang dijalankan Kemendikbud untuk memperbaiki sikap siswa SD/SMP/SM adalah program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Dalam implementasinya, Kemendikbud juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara aktif melaksanakan PPK dan budaya anti korupsi. Dengan terlibatnya banyak pihak dalam program ini, diharapkan PPK dapat menjadi fondasi dan roh utama pendidikan dan kebudayaan.

### C. Isu Permasalahan Penguatan Karakter di Indonesia

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengembangan SDM yang unggul, berkompentensi dan berkarakter. Dalam upaya tersebut seiring dengan perkembangan zaman terdapat pokok masalah dan tantangan yang hadir di masyarakat dalam penguatan karakter generasi penerus bangsa. Permasalahan dalam upaya penguatan karakter meliputi turunnya tingkat kepercayaan kepada Pancasila, intoleransi, kekerasan terhadap anak dan perempuan, perundungan, pornografi, penyalahgunaan narkoba, serta tantangan-tantangan bonus demografi, karakteristik generasi Z dan alpha dan disrupsi teknologi. Penjelasan permasalahan dan tantangan tersebut sebagai berikut.



Gambar 1. Isu Prioritas Penguatan Karakter Kemendikbud

Berdasarkan Gambar 3, terdapat 2 pendekatan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk penguatan karakter, yaitu penguatan dan penuntasan. Penguatan yang dimaksud adalah mengantisipasi ancaman terhadap ideologi Pancasila melalui penguatan Profil Pelajar Pancasila



(PPP), inklusivitas, dan kebinekaan serta penuntasan 3 (tiga) dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi serta penuntasan penyalahgunaan narkoba dan isu lain yang dianggap penting.

## 1. Ancaman Ideologi Pancasila

Pada era modern saat ini, seperti diketahui bersama bahwa penerus bangsa Indonesia ke depan adalah generasi milenial, sebuah generasi yang bersikap selalu terbuka dengan segala perubahan yang terjadi di dunia berpotensi bisa mengancam Pancasila sebagai dasar negara. Pihak asing, melalui dinamisnya dunia saat ini berpotensi memecah belah NKRI dengan berkedok ekonomi maupun berjubah agama serta budaya <sup>1</sup>.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan surveynya menemukan bahwa sebanyak 19,4% aparatur sipil negara (ASN) tidak setuju dengan Pancasila bahkan sekitar 3% unsur TNI juga menolak Pancasila. Sebelumnya, Menhan Ryamizard Ryacudu berdasarkan riset dari Alvara Research Center dan Mata Air Foundation mengatakan bahwa 23,4% mahasiswa menolak Pancasila dan setuju dengan jihad dan 23,3% siswa, sedangkan pada pegawai swasta mengatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila <sup>2</sup>. Tentunya, ini bisa menjadi semacam peringatan kepada semua pihak untuk segera melakukan hal-hal yang dianggap penting untuk mencegah hal ini.

Walaupun demikian, tetap ada berita baik, dari hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan September 2019 mencatat bahwa 86,5% umat Islam berpandangan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah paket yang terbaik untuk bangsa dan negara, meskipun terdapat 4% yang ingin menggantinya menjadi syari'at Islam, 1,8% menghendaki ideologi lain dan 7,7% menjawab tidak tahu. Menurut LSI terdapat peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2016 yang tercatat 82,3% <sup>3</sup>.

## 2. Intoleransi

Terdapat 2 (dua) bentuk intoleransi, yaitu Intoleransi Ringan dan Intoleransi Berat. Untuk Intoleransi Ringan terdiri dari: (i) tidak memberikan hak sarana belajar siswa, mahasiswa dan sarana mengajar GTK dan dosen karena perbedaan SARA dan kepercayaan; (ii) tidak memberikan hak insentif pengajar karena alasan perbedaan SARA dan kepercayaan; (iii) merundung anggota komunitas sekolah atau kampus yang menggunakan atau tidak menggunakan atribut keagamaan tertentu; (iv) merundung anggota komunitas sekolah / kampus karena perbedaan SARA dan kepercayaan; (v) melarang pelaksanaan ibadah agama / kepercayaan tertentu di sekolah atau kampus; (vi) memaksa pemakaian seragam atau atribut khas keagamaan tertentu di luar persetujuan di awal masuk sekolah atau kampus; (vii) memaksa anggota komunitas sekolah atau kampus untuk melakukan praktik agama /kepercayaan yang tidak dianutnya; (viii) menolak atau menghalangi pendaftaran siswa, mahasiswa, guru, atau dosen karena alasan perbedaan SARA dan kepercayaan; (ix) menghalangi proses kenaikan pangkat guru / dosen karena perbedaan SARA / kepercayaan; (x) mengurangi hasil penilaian tes dan ujian karena alasan perbedaan SARA dan kepercayaan; (xi) mengajarkan kebencian terhadap SARA atau kepercayaan tertentu; dan (xii) mengajarkan kebencian terhadap empat konsensus nasional: UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Sedangkan untuk Intoleransi Berat terdiri dari radikalisme dan ekstremisme kekerasan seperti: (i) mengajarkan atau menganjurkan anggota komunitas sekolah untuk melakukan kekerasan kepada orang lain atas dasar perbedaan SARA dan Kepercayaan; (ii) mengajarkan penggunaan atribut-atribut palsu yang bermuatan ekstremisme seperti senjata atau alat berbahaya lainnya; dan (iii) terlibat dalam aksi atau melakukan tindakan kekerasan, penyerangan atau pengusiran SARA dan Kepercayaan tertentu.

<sup>1</sup> <https://www.kompasiana.com/yudikresnasurya/5ed6021e097f365c001e3425/ancaman-terhadap-pancasila-di-era-milenial?page=2>

<sup>2</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/254222-upaya-mengganti-pancasila-jadi-ancaman-serius>

<sup>3</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20191103/15/1166334/survei-lsi-865-persen-muslim-indonesia-terima-pancasila>







Gambar 2. Kondisi Toleransi di Indonesia <sup>4</sup>

Hasil nilai rata-rata nasional Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang di lakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat), Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2019 yaitu di angka 73,83 dengan catatan terdapat sejumlah provinsi yang berada di bawah nilai rata-rata nasional. Pelaksanaan survei dilakukan pada 16 s.d 19 Mei 2019 dan 18 s.d 24 Juni 2019 dengan jumlah responden 13.600 orang dari 136 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi <sup>5</sup>.

### 3. Perundungan

Penindasan, perundungan, perisakan, atau pengintimidasian (bahasa Inggris: *bullying*) adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan<sup>6</sup>.

Data hasil riset Programme for International Students Assessment (PISA) 2018 menunjukkan murid yang mengaku pernah mengalami perundungan (bullying) di Indonesia sebanyak 41,1%. Angka murid korban bully ini jauh di atas rata-rata negara anggota Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) yang hanya sebesar 22,7%. Selain itu, Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan. Selain mengalami perundungan, murid di Indonesia mengaku sebanyak 15% mengalami intimidasi, 19% dikucilkan, 22% dihina dan barangnya dicuri. Selanjutnya sebanyak 14% murid di Indonesia mengaku diancam, 18% didorong oleh temannya, dan 20% terdapat murid yang kabar buruknya disebar.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan kasus perundungan terhadap anak-anak paling banyak didominasi oleh siswa Sekolah Dasar (SD). Diketahui, ada 25 kasus atau 67% yang tercatat oleh KPAI baik dari kasus yang disampaikan melalui pengaduan langsung maupun online sepanjang Januari sampai April 2019.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> <https://www.validnews.id/Infografis-Kondisi-Intoleransi-Di-Indonesia-Rendah-dH>

<sup>5</sup> <https://indonews.id/artikel/26113/Menyoal-Indeks-Kerukunan-Umat-Beragama-2019/>

<sup>6</sup> Wikipedia

<sup>7</sup> KPAI, korban perundungan terhadap anak didominasi siswa SD, artikel berita hukum, Mei 2019



Namun di sisi lain, Barak (2008) menyatakan bahwa remaja yang berselancar di dunia maya menghadapi sejumlah masalah serius atau bahaya terkait penggunaan internet yang mereka lakukan. Sebagian remaja mengalami kecanduan internet (Shaw & Black, 2008), kecanduan game online (Kuss & Griffith, 2012), terpapar oleh materi seksual (Mitchel, Finkelhor, & Wolak, 2003), kecanduan seks (Griffiths, 2004), terlibat perjudian *online*, atau terlibat dalam tindakan *cyberstalking*. Beberapa remaja mengalami kekerasan, bujukan secara seksual, dan jenis kejahatan yang lain ketika mereka berselancar di dunia maya. Salah satu tantangan yang harus dihadapi remaja di internet tersebut adalah mereka rentan untuk menjadi pelaku atau korban perundungan maya atau *cyberbullying*

8



Gambar 3. Prevalensi Perundungan di Indonesia

Survei yang dilakukan oleh PEW Internet (2013) pada remaja di Amerika menemukan bahwa satu dari tiga remaja menjadi korban perundungan di dunia maya. Sementara itu, kajian American Medical Association (2013) melaporkan bahwa ada 3,7 anak-anak menjadi pelaku perundungan, sedangkan 3,2 juta anak menjadi korban. Hasil penelitian Center for Disease Control (2014), yang dilakukan secara longitudinal selama satu tahun pada remaja di Amerika Serikat, juga menunjukkan bahwa 20% siswa sekolah menengah di Amerika Serikat melaporkan pernah dirundung dan 15% melaporkan dirundung di dunia maya.

Kondisi yang tidak jauh beda juga terjadi di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Ipsos pada 18.687 warga di 24 negara – termasuk Indonesia - juga menemukan bahwa satu dari delapan orang tua menyatakan anak mereka pernah menjadi korban pelecehan dan penghinaan melalui media *online*. Lebih jauh, penelitian tersebut mengungkap bahwa sebanyak 55% orang tua menyatakan mereka mengetahui seorang anaknya mengalami perundungan di dunia maya (Napitupulu, 2012).

<sup>8</sup> Sartana & Nelia Afriyeni, Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal, Jurnal Psikologi Insight Departemen Psikologi Vol. 1, No. 1, April 2017: hlm 25-39 Universitas Pendidikan Indonesia



#### 4. Kekerasan Seksual

Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi masalah global (2011). Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual umumnya terjadi di wilayah yang dipandang “aman” seperti sekolah, kampus/universitas, asrama mahasiswa, dan tempat kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban seperti teman, guru/ dosen, rekan kerja, atau pimpinan kerja (WHO, 2012).

Kekerasan seksual merupakan setiap Tindakan berupa fisik maupun nonfisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual pada seseorang, dan/atau orang tersebut kehilangan kesempatan melaksanakan Pendidikan dengan aman dan optimal. Tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain ini menyasar bagian tubuh seseorang atau terkait dengan Hasrat seksual yang dapat mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan.

Kasus kekerasan pada anak di Indonesia pada tahun 2020 tak menurun. Hal ini seiring ragam isu kekerasan pada anak yang mencuat di beberapa media. Presiden Jokowi Widodo angkat bicara soal kasus kekerasan pada anak yang didominasi kekerasan seksual, “Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, ternyata kekerasan seksual menempati posisi teratas diikuti kekerasan psikis mau pun fisik,” hal ini disampaikan bapak Jokowi dalam rapat terbatas ‘Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak’ di Istana Merdeka, seperti tertulis pada setneg.go.id, Kamis (9/1 2020) <sup>9</sup>

Mengacu pada data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, angka kekerasan terhadap anak naik signifikan pada 2016. Itu pun baru mengacu pada sebagian kecil kasus yang berhasil dilaporkan dan ditangani pihak berwenang. “Kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan pada Tahun 2015 tercatat 1.975 dan meningkat menjadi 6.820 di 2016. Dari angka tersebut, sebanyak 88,24 persen anak perempuan dan 70,68 persen anak laki-laki di Indonesia berusia 13 – 17 tahun mengalami kekerasan fisik. Sementara untuk kategori kekerasan emosional, 96,22 persen anak perempuan dan 86,65 persen anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami.

Dalam laporan “Global Report 2017: Ending Violence in Childhood” mencatat 73,7 persen anak Indonesia berusia 1 – 14 tahun mengalami kekerasan fisik dan agresi psikologis di rumah sebagai upaya pendisiplinan (violent discipline). Menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada tahun 2019 ditemukan sebanyak 350 perkara kekerasan seksual pada anak.<sup>10</sup>

Di lingkungan Pendidikan, kasus kekerasan seksual umumnya terjadi akibat pemanfaatan relasi kuasa yang timpang dengan berbagai ancaman baik fisik maupun non fisik. Salah satu inisiasi yang dilakukan oleh Tirta.id bersama dengan VICE dan The Jakarta Post untuk berbagi kesaksian kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan tinggi adalah melalui formulir daring #NamaBaikKampus, diperoleh 174 testimoni penyintas kekerasan seksual di lingkungan kampus hanya dalam rentang 13 Februari – 29 Maret 2019.

#### 5. Penyalahgunaan Narkoba

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/19025061/komnas-perempuan-inses-jadi-kekerasan-terhadap-anak-perempuan-tertinggi>

<sup>10</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/14253441/pimpin-rapat-soal-kekerasan-pada-anak-ini-3-instruksi-jokowi>



Permasalahan narkoba di seluruh dunia tahun 2019 masih menjadi perhatian serius dari berbagai negara. Hal tersebut terlihat dari laporan World Drug Report (WDR) 2019 yang menggambarkan kondisi penyalahgunaan narkoba dunia tahun 2017, bahwa kondisi penyalahgunaan narkoba di Dunia diperkirakan 271 juta orang atau 5,5% dari populasi global berusia 15-64 tahun, dengan dominasi jenis narkoba yang disalahgunakan ganja 61% (188 juta) dari total penyalahgunaan narkoba usia 15-69 tahun. Prevalensi penggunaan ganja tetap stabil secara luas di tingkat global selama satu dekade, bahkan dengan tren yang meningkat di Amerika dan Asia.

Kondisi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. menurut hasil Survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia oleh BNN dan LIPI (2019), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,80% atau ±3.419.188 orang, atau 180 dari 10.000 penduduk Indonesia usia 15-69 tahun terpapar narkoba dalam setahun terakhir.

Dari survey di atas juga diketahui, terdapat 5 (lima) jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan, yaitu: ganja (65,2%), benzodiazepin (35,5%), shabu (28,4%), ekstasi (16,4%) dan dextro (7%). Umur pertama pakai narkoba, jika di pedesaan berusia 10 tahun dan jika di perkotaan berusia 7 tahun.

Data Statistik Kriminal tahun 2019 menunjukkan 3,2% dari total pengguna Narkoba adalah pelajar/mahasiswa yang berarti 4 dari 100 pelajar/mahasiswa pernah memakai Narkoba. Usia awal pengguna Narkoba adalah 10 tahun dengan motif dibujuk teman. Persentase siswa pernah memakai Narkoba adalah sebanyak 4,8% jenjang SMP/ sederajat, 6,4% jenjang SMA/ sederajat, dan 6% dari jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan status pemakaian, 1,40% siswa coba pakai, 0,44% teratur pakai, 0,17% pecandu, dan 0,06% menggunakan Narkoba jenis suntik.

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) isu besar implementasi penguatan karakter di Indonesia, yaitu:

1) Perluasan akses layanan

Berdasarkan pada kondisi umum di atas, capaian pelaksanaan penguatan karakter belum mencakup ke seluruh komponen ekosistem pendidikan. Permasalahan perluasan akses antara lain, (a) wilayah geografi Indonesia yang luas, (b) demografi dan sosial budaya yang beragam, dan (c) jumlah penduduk yang besar dengan ragam usia dan karakter.

2) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti di Sekolah

Pendidikan merupakan pilar kebangsaan yang memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan bela negara, membangun karakter dan meneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuat identitas nasional. Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai salah satu pusat dari proses pembentukan kepribadian anak didik sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat.

Namun, pendidikan karakter dan budi pekerti belum sepenuhnya dapat terwujud dalam lingkungan sekolah dan budaya belajar yang mampu tumbuh sebagai kebiasaan yang baik. Hal ini tercermin dari rendahnya indeks integritas sekolah dalam mengikuti Ujian Nasional (UN), yakni masih 30 persen daerah yang memiliki indeks integritas UN rendah (Kemdikbud, 2017). Pelajar pengguna Narkoba juga masih tinggi, dari 3,3 juta pengguna.

Narkoba, sebanyak 24 persen atau 810.267 orang pengguna adalah pelajar (BNN, 2017). Selain itu kekerasan fisik di kalangan pelajar juga masih marak terjadi sekitar 32,7 persen pelajar pernah setidaknya satu kali diserang secara fisik (Survei Nasional Kesehatan Berbasis Sekolah – SNKBS, 2015). Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga mengalami penurunan dari 82,0 (Susenas MSBP, 2015) menjadi 81,4 (Susenas MSBP, 2018).

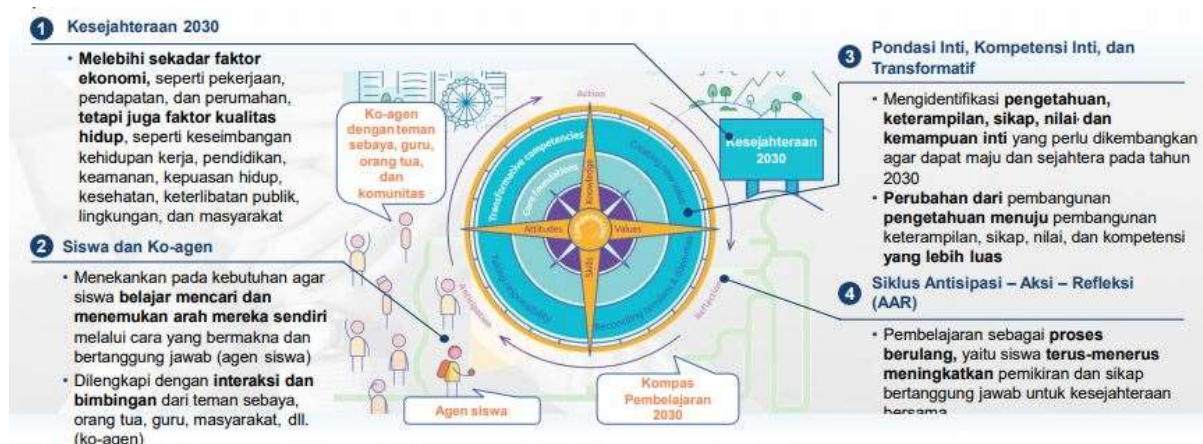


### 3) Belum Optimalnya Peran Keluarga dan Masyarakat

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui internalisasi nilai dalam proses pengasuhan, baik di dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun masyarakat. Keluarga merupakan pengasuh utama dan pertama bagi anak sehingga keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian, terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Sebagai orang tua, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mendidik dan mengasuh anak di dalam keluarga.

## D. Tantangan Penguatan Karakter di Indonesia

### 1. Tantangan Pendidikan dan Kebudayaan di Masa Mendatang



Gambar 4. Masa Depan Pembelajaran

Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang mencerminkan nilai, sikap mental, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila menjadi benteng pertahanan budaya bangsa yang dapat menjadi penyaring nilai-nilai budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Berbagai upaya pembinaan dan aktualisasi Pancasila yang dilaksanakan perlu ditingkatkan untuk merespons arus globalisasi yang membawa dampak sangat luas, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Globalisasi membuat pergaulan antarnegara semakin intensif, mobilitas manusia kian mudah dan cepat, serta pertukaran budaya antar bangsa kian longgar. Bila tidak diantisipasi dengan baik, pertukaran budaya melalui globalisasi tentu dapat mempengaruhi budaya dan karakter bangsa Indonesia. Gambar 18 memperlihatkan bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sedang melakukan Pembahasan sedang berjalan di tingkat global terkait pembelajaran masa depan yang harus dipersiapkan, "OECD Learning Compass 2030". Sebuah kompas yang bertujuan untuk membuat kerangka pembelajaran untuk membantu negara-negara memikirkan pembangunan kompetensi agar dapat maju dan sejahtera pada tahun 2030.

Saat ini, pendidikan karakter belum sepenuhnya dapat mewujudkan lingkungan sekolah dan budaya belajar yang mampu menumbuhkan kebiasaan perilaku yang baik. Hal ini tercermin dari rendahnya indeks integritas sekolah dalam mengikuti Ujian Nasional, yakni masih 30 persen daerah yang memiliki indeks integritas UN rendah (Kemdikbud, 2017). Pelajar pengguna narkoba juga masih tinggi, dari 3,3 juta pengguna narkoba, sebanyak 24 persen atau 810.267 orang pengguna adalah



pelajar (BNN, 2017). Selain itu kekerasan fisik di kalangan pelajar juga masih marak terjadi, sekitar 32,7 persen pelajar pernah setidaknya satu kali diserang secara fisik (SNKBS, 2015). Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga mengalami penurunan dari 82,0 (Susenas MSBP, 2015) menjadi 81,4 (Susenas MSBP, 2018) <sup>11</sup>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengidentifikasi sembilan tantangan pendidikan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program. Tantangan pendidikan ini juga akan berdampak kepada penguatan pendidikan karakter anak didik bangsa <sup>12</sup>.

Tabel 1. Tantangan Memajukan Pendidikan

No.	Tantangan
1.	Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2.	Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepercayaan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepercayaan bekerja sama)
3.	Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator Pembelajaran
4.	Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai
5.	Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata ( <i>one size fits all</i> ) menjadi berpusat pada pelajar dan personalisasi
6.	Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
7.	Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8.	Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh peraturan dan perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
9.	Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif ( <i>agency</i> ) semua pemangku kepentingan

Tidak hanya bidang pendidikan, penguatan karakter juga harus disentuh dari bidang kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengidentifikasi 7 tantangan bidang kebudayaan.

<sup>11</sup> Bahan Diskusi Gugus Tugas Nasional GNRM dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti (RPJMN 2020-2024). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

<sup>12</sup> Draf Rencana Strategis Pusat Penguatan Karakter 2020-2024. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Tabel 2. Tantangan Memajukan Kebudayaan








No.	Tantangan
1.	Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik
2.	Optimalisasi kegiatan ekstra-kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter
3.	Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya
4.	Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia
5.	Pengawasan dan pembinaan pemangku kepentingan perbukuan, serta pemberian kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan demi terwujudnya sistem perbukuan nasional yang sehat
6.	Diplomasi kebudayaan yang lebih holistik di luar negeri
7.	Kemitraan dengan industri kreatif dan pemangku kepentingan kebudayaan lainnya untuk memajukan ekonomi berbasis kebudayaan

## 2. Disrupsi Teknologi akan Berdampak pada Semua Sektor

Dalam satu dekade ini telah terjadi transformasi digital yang luar biasa. Menurut *World Economic Forum*, seiring dengan proses digitalisasi semakin meluas dan telah menjangkau lintas masyarakat, budaya, dan ekonomi. Hampir setiap aspek kehidupan telah tersentuh atau berubah dikarenakan proses digitalisasi, seperti cara berkomunikasi sampai bagaimana kita mengkonsumsi informasi dan belajar. Transformasi digital telah meredefinisikan proses pembelajaran, berbagai pihak berupaya untuk membekali generasi ke depan dengan keterampilan era digital baru dan kebebasan untuk berkegiatan dan berinovasi<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> World Economic Forum <https://www.weforum.org/agenda/2019/01/digital-disruption-can-help-us-build-a-better-tomorrow>



						
<b>Drones cost per unit:</b> - 2007: \$100k - 2013: \$700	<b>3D printing cost averages for equivalent functionality:</b> - 2007: \$40k - 2014: \$100	<b>Industrial robots:</b> - 2007: \$550k - 2014: \$20k	<b>Costs for DNA sequencing:</b> - 2000: \$2.7bn - 2007: \$10mn - 2014: \$1k	<b>Solar power cost per kWh:</b> - 1984: \$30 - 2014: \$0.16	<b>Sensors (3D lidar):</b> - 2009: \$30k - 2014: \$80	<b>Cost of smartphone model with similar specifications:</b> - 2007: \$499 - 2015: \$10

Gambar 5. Teknologi Semakin Murah

Sumber: *World Economic Forum White Paper Digital Transformation of Industries In collaboration withAccenture (2016)*

Keterampilan era digital baru berkembang mengikuti tren disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi menurut Bank Dunia adalah inovasi yang mampu merubah cara konvensional untuk melakukan sesuatu<sup>14</sup>. Hasil dari disrupsi teknologi misalnya adalah penerapan otomasi, *Artificial Intelligence* (AI), *big data*, 5G, 3D printing, dan *Internet of Things* (IoT). Penggunaan teknologi tersebut semakin umum didukung dengan biaya pembuatan teknologi dari tahun ke tahun semakin menurun seperti ditunjukkan Gambar 18. Masing-masing dari teknologi itu akan merubah cara hidup kita misal dalam berinteraksi, bekerja, memproduksi barang, menganalisis informasi, dan membuat keputusan. Teknologi juga akan merubah kebutuhan tenaga kerja ke depan seperti terlihat pada Gambar 19. Perubahan cara hidup sebagai dampak disrupsi teknologi tersebut tentunya harus dihadapi dengan karakter yang kuat seperti konsep Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan tetap menjaga idealisme dan realitas. Generasi ke depan haruslah memiliki kemampuan literasi era digital baru dan berkarakter kreatif dan inovatif. Sesuai dengan strategi pencapaian visi 2045 Indonesia di bidang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global<sup>15</sup>.

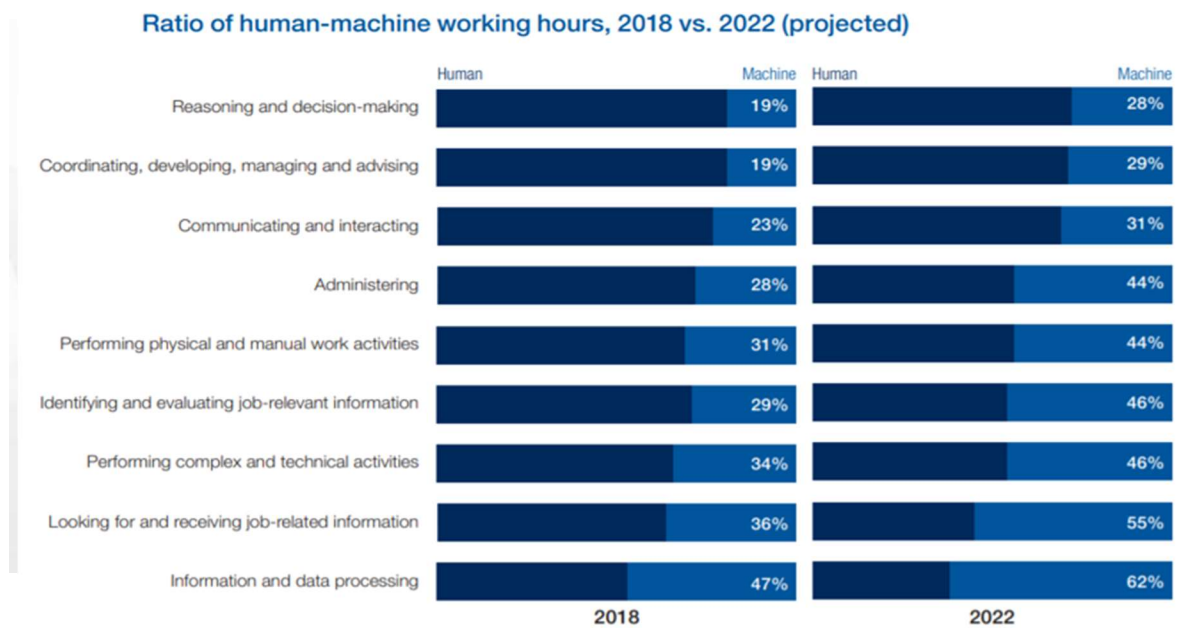
<sup>14</sup> World Bank, <https://olc.worldbank.org/content/disruptive-technology-overview>

<sup>15</sup> Narasi RPJMN 2020-2024





### 3. Perubahan Kehidupan Sosiokultural



Source: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum.

Grafik 1. Perubahan Tenaga Kerja Akibat Perkembangan Teknologi

Perubahan kehidupan sosiokultural bisa dilihat perubahan demografi, profil sosio ekonomi dari populasi dunia telah mengalami perubahan, diantaranya:

- Meningkatnya usia harapan hidup dan usia lama bekerja
- Tumbuhnya migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan kelas menengah
- Meningkatnya tenaga kerja yang terus bergerak (mobile) dan fleksibel
- Munculnya kepedulian konsumen terhadap etika, privasi, dan kesehatan

Perubahan-perubahan kehidupan sosialkultural ini membutuhkan kesiapan dari SDM Indonesia, yaitu kemampuan memecahkan masalah, kognitif dan sosial.



Grafik 2. Perubahan Kebutuhan Keterampilan Tenaga Kerja



#### 4. Penguatan Karakter Pada Generasi Z dan Alpha serta Tantangan ke Depan

Tantangan berikutnya adalah penguatan karakter pada generasi Z dan Alpha. Generasi ialah sekumpulan orang (demografi) yang dilahirkan dalam kurun waktu yang sama, yang karena melalui kondisi lingkungan yang relatif sama, secara kolektif akan membentuk karakteristik yang khas dan berbeda dengan generasi sebelumnya<sup>16</sup>. Kupperschmidt's (2000) menyatakan bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki



pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka

Gambar 6. Klasifikasi Generasi (William H. Frey)

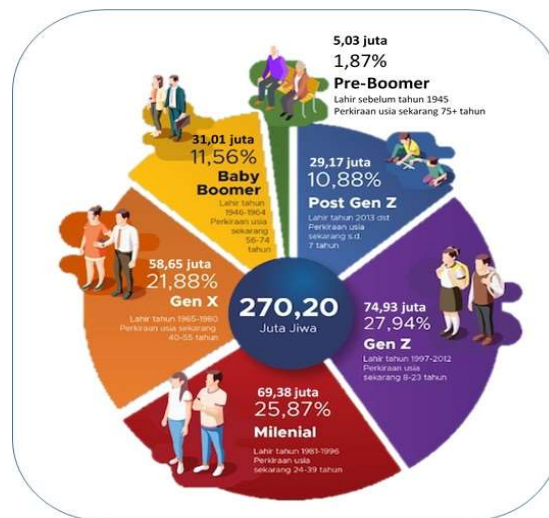
Generasi Z disebut juga *iGeneration* atau generasi internet. Generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu (*multi tasking*) seperti: menjalankan media sosial menggunakan ponsel, *browsing* menggunakan komputer, dan mendengarkan musik menggunakan *headset*. Setelah generasi Z, terdapat generasi alpha. Generasi alpha adalah generasi yang sudah hidup di zaman yang serba modern dan canggih. Era komputerisasi sudah tidak ada batasnya lagi. Akses terhadap informasi dan teknologi komunikasi dari segala penjuru sangat mudah didapat. Tidak ada lagi batasan, segalanya sudah sangat transparan. Pola pikir dan karakter mereka dipengaruhi oleh pola pikir orang tuanya (generasi Y awal kelahiran tahun 80-an) yang memiliki pandangan terbuka dan moderat. Orang tua generasi ini umumnya telah mendapat pendidikan yang sangat baik dan bahkan tinggi. Sehingga anak-anak mereka pun akan mengikuti pola pikir orang tuanya yang menurut mereka *open minded*. Tidak jarang generasi ini sudah banyak yang melupakan nilai-nilai akhlak, tradisi, dan norma kehidupan yang dapat membuat generasi ini tumbuh tanpa mengenal jati diri yang seutuhnya. Generasi ini sangat dimanjakan dengan kemajuan teknologi sehingga mereka cenderung menjadi malas untuk menggunakan kemampuan analisa mereka, menjadi pribadi yang mudah putus asa karena hal sepele, mudah galau, dan melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Suganda, Tarkus. 2018. Pengelolaan Pembelajaran Zaman Now (Generasi Z). Universitas Padjajaran

<sup>17</sup> Mulyadi, M. Budi dan Aan Hasanah. Kesenjangan Karakteristik Antar Generasi dalam Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 Universitas Suryakencana.



Hasil sensus penduduk Indonesia pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Penduduk (SP) 2020 secara online maupun tatap muka sepanjang Februari hingga September 2020, penduduk Indonesia didominasi generasi Z sebanyak 27,94%. Komposisi jumlah penduduk Indonesia berdasarkan klasifikasi generasi hasil sensus penduduk BPS tahun 2020 dapat



dilihat dalam diagram berikut.

Gambar 7. Komposisi Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan Klasifikasi Generasi (BPS, 2021)

Dari Gambar di atas terlihat bahwa generasi Z sebanyak 74,93 juta jiwa (27,94%) dan generasi alpha (post gen Z) sebanyak 29,17 juta jiwa (10,88%). Kalau dijumlahkan generasi Z dan generasi alpha sebanyak 104,10 juta jiwa atau 38,82% dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya 270,20 juta jiwa.

Generasi Z dan generasi alpha ini merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Jangan sampai mereka rusak akibat kemajuan teknologi, tetapi harus menjadi unggul dengan kemajuan teknologi tersebut. Untuk itu perlu pendidikan dan penguatan karakter bagi mereka sehingga menjadi generasi emas Indonesia yang berdaya saing, beradiluhung dan berjiwa Pancasila.



## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **A. Visi**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Kementerian yang mengemban amanat pembangunan sumberdaya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka visi Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kemendikbudristek berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan visi dan misi presiden.

#### **B. Misi**

Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; dan
2. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.



### C. Tujuan

Salah satu tujuan Renstra Kemendikbudristek yang tertuang pada Permendikbudristek Nomor 13 tahun 2022 adalah **penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter**. Dengan demikian rumusan tujuan Renstra Pusat Penguatan Karakter adalah sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan Tahun 2024
Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	Persentase provinsi dan Kab/Kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan	100%
	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	100%
	Persentase provinsi dan kab/kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan	100%

### D. Perspektif Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kemendikbudristek perlu menyusun arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan yang selaras. Oleh karena itu, dokumen Renstra Kemendikbudristek menyajikan 2 (dua) perspektif dalam pencapaiannya.

#### 1. Perspektif Tujuan (Profil Pelajar Pancasila)

Profil Pelajar Pancasila sebagai elaborasi tujuan pendidikan nasional adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan 6 (enam) ciri utama: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) berkebinekaan global, (3) bergotong royong, (4) mandiri, (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1.





Gambar 8. Dimensi-Dimensi Profil Pelajar Pancasila

Enam ciri tersebut menunjukkan bahwa Profil Pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja tetapi juga pada sikap dan perilaku yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan berkewargaan global.

## 2. Perspektif Cara (Merdeka Belajar)

Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menyatakan bahwa paradigma pendidikan yang memerdekakan memiliki 3 (tiga) ciri yaitu:

### a. Tidak Hidup Terperintah

Peserta didik belajar dengan kesadaran dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan atau perintah orang lain.

### b. Berdiri Tegak karena Kekuatan Sendiri

Peserta didik berdiri tegak karena kekuatan sendiri dan mampu menemukan cara dalam mengatasi kesulitan belajar.

### c. Cakap Mengatur Hidupnya dengan Tertib

Peserta didik mampu menilai tindakan dan kemajuan belajarnya sehingga dapat melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan belajar.

Pada hakikatnya gagasan Ki Hadjar Dewantara yang kemudian disebut sebagai Merdeka Belajar, sejalan dengan konsep *selfregulated learning* yang telah dikaji oleh beberapa ahli seperti Zimmerman; Boekaerts, Winne dan Hadwin, Pintrich; Efklides, serta Hadwin, Järvelä dan Miller (Panadero, 2017). *Self regulated learning* adalah keyakinan seseorang terhadap kapasitas dirinya dalam menentukan tindakan, pikiran dan perasaan yang mengarah pada pencapaian tujuan, sembari melakukan *monitoring* diri dan refleksi diri terhadap kemajuan dalam mencapai target.



Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Semangat merdeka belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar, membentuk 5 (lima) pergeseran paradigma dalam kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan, sebagai berikut.

- a. Semula mekanisme kontrol menjadi pemberdayaan melalui umpan balik. Mekanisme kontrol terbukti tidak selalu efektif serta dapat menimbulkan tekanan dan orientasi yang keliru. Dalam ekosistem yang berdampak, umpan balik yang berkelanjutan menjadikan semua pihak lebih berdaya.
- b. Semula arahan menjadi penguatan praktik baik di lapangan. Kepemimpinan pendidikan dengan semangat merdeka belajar tidak menjadikan instruksi sebagai satu-satunya bentuk komunikasi, akan tetapi kepemimpinan yang mendengarkan, memahami, dan mengenali praktik baik di lapangan. Upaya penguatan praktik baik akan menumbuhkan kepercayaan diri dan inisiatif pelaku pendidikan melakukan inovasi pembelajaran dan pendidikan.
- c. Semula apresiasi hanya bagi yang terbaik menjadi bagi semua kemajuan. Apresiasi hanya bagi yang terbaik dapat menimbulkan demotivasi bagi mereka yang merasa tidak berdaya. Semangat merdeka belajar mendorong pengelolaan pendidikan yang mengapresiasi semua kemajuan yang terjadi, bahkan untuk kemajuan kecil oleh satuan pendidikan kecil yang masih berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan semangat merdeka belajar ini, pelaku dalam ekosistem pendidikan akan lebih aktif dan lebih merasa berdaya, di manapun posisinya saat ini.
- d. Semula kompetisi menjadi kolaborasi untuk kemajuan bersama. Semangat merdeka belajar tanpa meninggalkan kompetisi, tapi lebih menonjolkan nilai-nilai gotong royong dalam bentuk kolaborasi antarpihak. Dengan kolaborasi, akan lebih banyak energi dan dukungan bagi semua pelaku untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu dua pihak tapi tanggung jawab bersama demi masa depan anak bangsa.
- e. Semula berfokus pada peningkatan akses menjadi peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Semangat merdeka belajar memperluas fokus pembangunan pendidikan pada peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Hal ini mendorong lebih banyak



kebijakan afirmatif dan asimetris untuk memastikan semua anak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar pada akhirnya selaras dengan arah kebijakan nasional yang terkait dengan otonomi daerah, otonomi kampus, dan manajemen berbasis sekolah. Semangat merdeka belajar mendorong penguatan semua pihak untuk menjadi otonom sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan nasional dengan berpijak pada konteks satuan pendidikan dan daerah masing-masing.



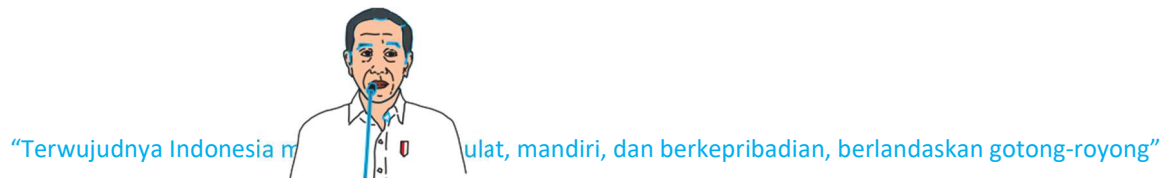


## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. ARAH KEBIJAKAN

Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:



Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawa Cita Kedua. Nawa Cita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawa Cita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Agenda pembangunan penguatan karakter akan mendukung seluruh agenda pembangunan Kemdikbud khususnya pada nomor (2) yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan arah kebijakan Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter melalui strategi (a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; dan (b) Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

Arah kebijakan dan strategi Pusat Penguatan Karakter pada kurun waktu 2020-2024 adalah dalam rangka mendukung agenda tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi



semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Kebijakan Pusat Penguatan Karakter mengacu pada Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter serta urusan ketatausahaan pusat. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penguatan Karakter menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter; (b) pelaksanaan penguatan karakter; (c) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter; (d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter; dan (e) pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

## **B. STRATEGI**

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengembangan SDM yang unggul, berkompentensi dan berkarakter. Dalam upaya tersebut seiring dengan perkembangan zaman terdapat pokok masalah dan tantangan yang hadir di masyarakat dalam penguatan karakter generasi penerus bangsa. Permasalahan dalam upaya penguatan karakter meliputi turunnya tingkat kepercayaan kepada Pancasila, intoleransi, kekerasan terhadap anak dan perempuan, perundungan, pornografi, penyalahgunaan narkoba, serta tantangan-tantangan bonus demografi, karakteristik generasi Z dan alpha dan disrupsi teknologi.

Terdapat 2 pendekatan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk penguatan karakter, yaitu penguatan dan penuntasan. Penguatan yang dimaksud adalah mengantisipasi ancaman terhadap ideologi Pancasila melalui penguatan Profil Pelajar Pancasila (PPP), inklusivitas, dan kebinekaan. Sedangkan untuk penuntasan terkait dengan 3 (tiga) dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi serta penuntasan penyalahgunaan narkoba dan isu kritis lainnya.

Strategi perubahan paradigma dan perilaku masyarakat memerlukan tahapan dan waktu, serta proses yang taktis dan strategis. Proses perubahan tentunya didasari dengan data dan informasi yang memadai tentang siapa yang akan menjadi target atas perubahan paradigma dan perilaku/sikap tersebut.

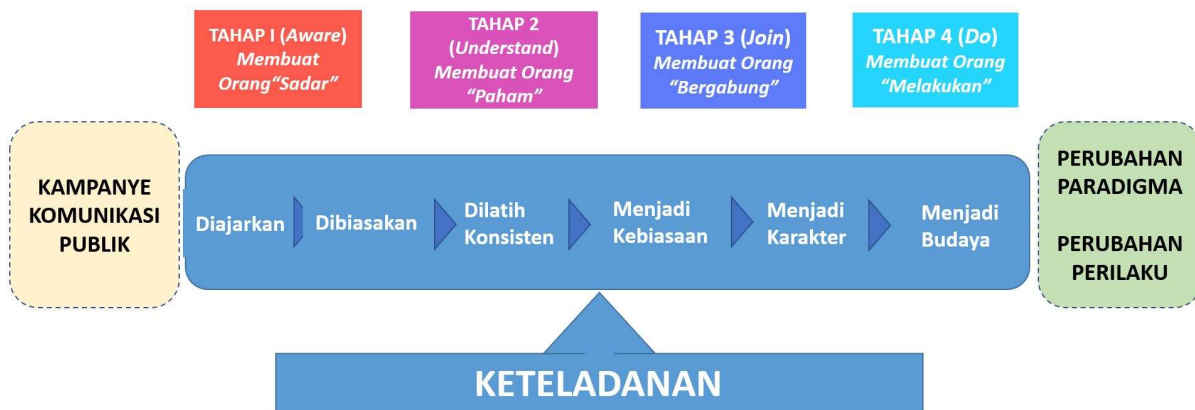
Pusat Penguatan Karakter secara garis besar menggunakan 2 (dua) strategi dalam implementasi kebijakan penguatan karakter, yaitu melalui kampanye komunikasi publik dan pemberdayaan ekosistem pendidikan.



## 1. Kampanye Komunikasi Publik

Tujuan dari kampanye komunikasi publik adalah agar terjadi perubahan paradigma dan perilaku masyarakat. Perubahan paradigma dan perilaku atau sikap dari ekosistem pendidikan tidak terjadi semeremta-merta. Memerlukan waktu yang panjang, dengan proses yang taktis dan strategis. Proses perubahan tentunya didasari dengan data dan informasi yang memadai tentang siapa akan menjadi target atas perubahan paradigma dan perilaku/sikap tersebut.

Perubahan paradigam dan perilaku yang diharapkan tercapai dari program penguatan karakter adalah *aware*, *understand*, *join*, dan *do*. Perubahan perilaku ini diuraikan dalam gambar berikut.



Gambar 9. Pendekatan Komunikasi Publik

Tujuan yang ingin dicapai pada setiap tahapan perubahan perilaku diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Indikator Tahapan Penguatan Karakter

Aware	Understand	Join	Do
mengetahui, tertarik, dan sadar akan profil pelajar pancasila dan nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya mengetahui, tertarik, dan sadar akan bahaya yang terkandung di dalam 4 Dosa Besar	memahami pentingnya nilai-nilai karakter dalam profil pelajar pancasila dan bagaimana cara melakukan penguatan karakter memahami berbahayanya 4 Dosa besar dan tahu bagaimana cara menghindarinya	terlibat dan mendukung aktivitas penguatan karakter	menerapkan profil pelajar pancasila dan menyebarkan menjauhi 4 dosa besar dan menyebarkan bahayanya



Pendekatan kampanye publik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *Above The line* dan *Below The Line*. Secara umum, media periklanan menurut Frank Jefkins (1997:86,136) terbagi menjadi dua, yaitu *above the line* (media lini atas) dan *below the line* (media lini bawah). Jenis media komunikasi yang termasuk media lini atas atau *above the line* (ATL) adalah berbagai media yang diinformasikan dan dikomunikasikan melalui berita.

#### 1) *Above The Line* (ATL)/ Lini Atas

Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga perlu dimanfaatkan sebagai media kampanye. Penyebarluasan konten penguatan karakter melalui kampanye target luas (*above the line*) adalah sebuah metode penyebaran konten dan informasi yang menggunakan media massa untuk mencapai sasaran yang lebih luas dan lebih umum. Kampanye target luas (*above the line*) merupakan bentuk teknik promosi dengan strategi “menarik perhatian” target melalui iklan yang menarik dan memunculkan kesadaran dan rasa ingin tahu target untuk mempelajari dan mencari tahu tentang produk/jasa yang dikampanyekan lebih dalam. Kampanye target luas (*above the line*) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran serta mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat tentang karakter yang berlandaskan nilai-nilai utama Pancasila.

Pelaksanaan penyebarluasan konten penguatan karakter melalui kampanye target luas kepada ekosistem pendidikan bertujuan untuk:

- Membangun lingkungan yang saling menghargai keragaman dan keunikan individu;
- Mulai melaksanakan modul-modul penguatan pendidikan karakter baik yang berbasis kelas, sekolah maupun masyarakat dan Masyarakat;
- Mengintegrasikan materi penguatan karakter nilai Pancasila ke dalam kurikulum;
- Mempergunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (merdeka belajar);
- Memperkuat pembentukan karakter melalui pendekatan lintas ilmu;
- Mendampingi peserta didik agar dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan bertanggungjawab atasnya;
- Mendorong peserta didik agar dapat mempergunakan berbagai macam metode dan teknik penyelesaian masalah sebagai alternatif perilaku anti perundungan (bullying).
- Menciptakan fungsi keteladanan antar warga satuan Pendidikan, terutama oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.

Kampanye publik target luas (*above the line*), terdiri dari tahapan produksi dan penayangan (*media placement*). Produksi atau Media yang digunakan dalam penyebarluasan konten secara luas (*above the line*) yaitu:



a) TV Komersial, Iklan Layanan Masyarakat, Iklan Bioskop

Kegiatan kampanye akan dilakukan dengan membuat sebuah acara maupun iklan yang akan ditayangkan di media televisi dan atau iklan bioskop ditayangkan sebelum film diputar.

b) Video Digital (Digital Video)

Kegiatan kampanye akan dilakukan dengan membuat video yang akan disebarluaskan melalui media elektronik. Video akan dibuat dalam beberapa versi dengan durasi maksimal 60 detik dan disebarluaskan ke aplikasi dan atau ke Media Sosial yang ada (contoh: Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, dan lainnya).

c) Key Visual

Kampanye dilakukan dengan membuat sebuah bentuk/symbol visual yang mampu menarik perhatian masyarakat. Key visual akan dibuat dalam beberapa versi bisa berupa desain foto, gambar maupun penulisan kata-kata.

d) Iklan Kreatif

Kegiatan kampanye akan dilakukan dengan melalui media iklan kreatif yang akan dipublikasikan di media cetak maupun elektronik.

e) Radio, Podcast

Kegiatan kampanye akan dilakukan di media radio, serta melalui aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk kampanye dalam bentuk podcast, melalui aplikasi Spotify, Joox, dan lainnya.

f) Advertorial

Kampanye dilakukan dengan membuat tulisan advertorial dan artikel yang akan dimuat di media massa. Advertorial dan artikel berisi ulasan mengenai nilai-nilai Pancasila dan merdeka belajar yang dapat menggugah pandangan masyarakat.

g) Cerita Bergambar (Komik dan Komik Digital)

Kegiatan kampanye menggunakan cerita bergambar atau komik dan komik digital dilakukan melalui media online atau media cetak agar konten yang disebarkan lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

h) Media Luar Ruang

Kampanye dilakukan dengan membuat spanduk/banner yang akan dipasang pada tempat-tempat strategis di luar ruang, maupun transportasi umum serta di media-media strategis yang mudah dikenali masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, media luar ruang kini juga telah dibuat dalam bentuk digital, yang mana juga akan dipasang pada tempat strategis ataupun bergerak seperti pada transportasi umum. Misalnya billboard, videotron atau digital billboard, mobile digital billboard, dan lainnya.



i) Permainan Daring

Bekerja sama pihak ketiga untuk membuat permainan daring yang memberikan edukasi dan informasi yang berkaitan dengan konten penguatan karakter yang mengacu pada nilai-nilai utama Pancasila dan Merdeka Belajar.

2) *Below The Line* (BTL)/ Lini Bawah

Kampanye Publik Target Terbatas/*Below The Line* (BTL) terhadap ekosistem pendidikan merupakan aktivitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung, yang ditujukan khalayak tertentu atau audiens terbatas, menggunakan media atau kegiatan yang memberikan pemangku kepentingan kesempatan untuk merasakan, menyentuh atau berinteraksi langsung terhadap satuan pendidikan, dengan periode yang telah ditetapkan mencapai tujuan.

Kampanye Publik Target Terbatas/*Below The Line* (BTL) ini disebar dan dilakukan pada satuan pendidikan secara tatap muka yang dapat meningkatkan kesadaran dan perubahan cara pandang/paradigma/pola pikir/perilaku sehari-hari masyarakat tentang karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan dilakukan melalui cara merdeka belajar.

Tujuan penyebarluaskan pandang/paradigma/pola pikir/perilaku sehari-hari satuan pendidikan tentang karakter melalui Kampanye Publik Target Terbatas/*Below The Line* (BTL), antara lain:

- Mendukung terbentuknya relasi yang baik antara satuan pendidikan, orang tua dan anak di dalam Masyarakat
- Membangun lingkungan dalam satuan pendidik yang saling menghargai keragaman dan keunikan individu;
- Mulai melaksanakan modul-modul penguatan pendidikan karakter baik yang berbasis kelas, sekolah maupun masyarakat;
- Mengintegrasikan materi penguatan karakter nilai Pancasila ke dalam kurikulum;
- Mempergunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (merdeka belajar);
- Memperkuat pembentukan karakter melalui pendekatan lintas ilmu;
- Memfasilitasi diskusi, dialog, dan permainan peranan dalam PPK;
- Mendampingi satuan pendidikan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan bertanggungjawab atasnya;



- Mendorong satuan pendidikan agar dapat mempergunakan berbagai macam metode dan teknik penyelesaian masalah sebagai alternatif perilaku anti perundungan (bullying)
- Menciptkan fungsi keteladanan antar warga satuan Pendidikan, terutama oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.

## 2. Pemberdayaan Ekosistem Pendidikan

Peran serta pemerintah, keluarga, satuan pendidikan, dan lingkungan atau komunitas masyarakat sangat penting dalam membangun sebuah ekosistem pendidikan yang baik. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada pasal 4 menyebutkan bahwa “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. Pemberdayaan ekosistem pendidikan yang dilakukan dalam penguatan karakter dilakukan melalui sinergi pemerintahan dan sinergi tri pusat pendidikan.

### a. Sinergi Internal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Pusat Penguatan Karakter dalam implementasi kebijakannya harus bersinergi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beban dan tanggung jawab dari penguatan karakter tidak bisa dilakukan hanya oleh Puspeka saja.

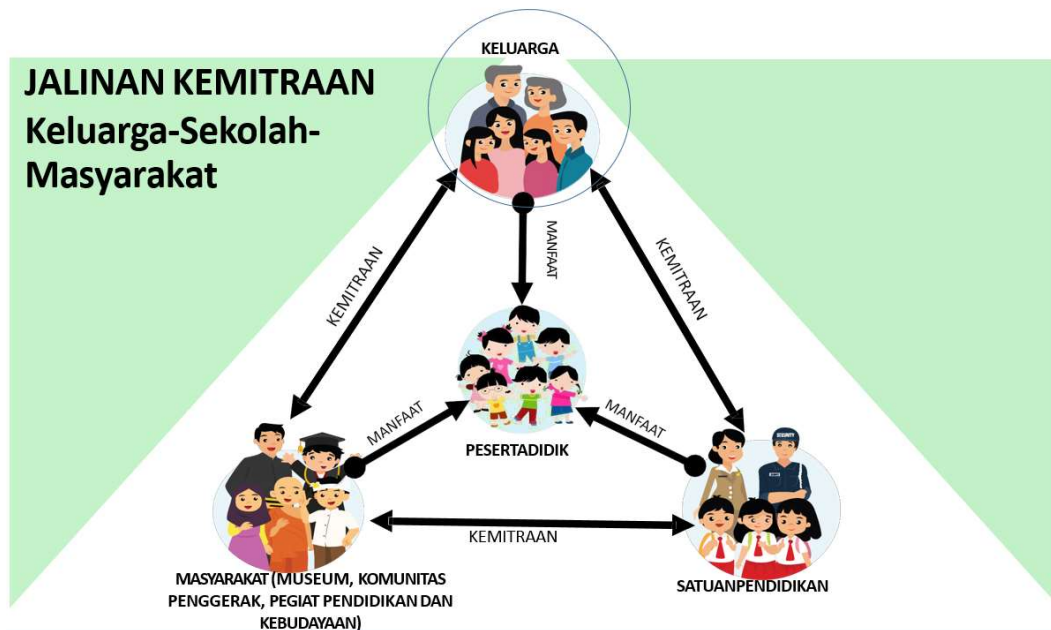
### b. Sinergi Eksternal (Antar K/L dan Orsosmas)



Gambar 10. Sinergi PUSPEKA dengan K/L dan Orsosmas



### c. Sinergi Tripusat Pendidikan



Gambar 11. Jalinan Kemitraan Tripusat Pendidikan

Tri pusat pendidikan merupakan tiga pusat yang memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak, tiga pusat tersebut yaitu pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah dan dalam masyarakat. Peran tri pusat pendidikan sebagai sarana pendidikan karakter anak sekolah dasar sangat besar, karena dalam pembentukan karakter anak, diperlukan kerja sama antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pembentukan karakter melalui tri pusat pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam pembentukan karakter, perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten mulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Pengukuran indikator-indikator implementasi materi Profil Pelajar Pancasila pada provinsi/kabupaten/kota:

1. Peraturan/kebijakan daerah, adanya regulasi atau kebijakan yang mendukung penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan.
2. Program yang relevan, adanya program atau kegiatan lanjutan yang mendukung kebijakan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan.
3. Bentuk-bentuk komunikasi publik yang dilakukan, adanya bentuk-bentuk komunikasi publik lanjutan yang mendukung penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan.





4. Pelibatan ekosistem, adanya bentuk-bentuk kegiatan pelibatan ekosistem (tripusat pendidikan) yang mendukung penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan.

KEGIATAN STRATEGI IMPLEMENTASI PROFIL PELAJAR PANCASILA	
1	<b>Kajian Kebijakan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian kebijakan Profil Pelajar Pancasila secara umum dan 6 Dimensi dari Pelajar Pancasila</li> <li>Kajian Gerakan Nasional Revolusi Mental</li> <li>Pengembangan Kapasitas Agen Penguatan Karakter</li> </ul>
2	<b>Produksi Konten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi Implementasi Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila</li> <li>Produksi konten kampanye Penguatan Karakter Profil Pelajara Pancasila (6 Dimensi dari Pelajar Pancasila)</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
3	<b>Sosialisasi dan Advokasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila (Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia, Berkebinekaan global, Bergotong royong, Mandiri, Bernalar kritis dan Kreatif)</li> <li>Publikasi Konten di Media Sosial, Laman Puspeka, Kanal YouTube</li> <li>Penyelenggaraan Webinar</li> <li>Advokasi kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota, Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
4	<b>Pendampingan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan Perwujudan Profil Pelajar Pancasila</li> <li>Pendampingan Agen Penguatan Karakter</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
5	<b>Bimbingan Teknis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bimtek Pemahaman Kebijakan Profil Pelajar Pancasila Internal Kemendikbudristek</li> <li>Bimtek Agen Penguatan karakter</li> </ul>
6	<b>Survei Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila</b>

Tabel 4. Strategi Implementasi Profil Pelajar Pancasila

Tabel 5. Strategi Implementasi Penuntasan 3 Dosa Besar

KEGIATAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENUNTASAN 3 DOSA	
1	<b>Kajian Kebijakan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian Analisis dan Pemetaan Kebijakan Kekerasan seksual, Intoleransi dan Perundungan</li> <li>Kajian Pengembangan Kebijakan Kekerasan seksual, Intoleransi dan Perundungan</li> </ul>
2	<b>Produksi Konten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi Implementasi Pencegahan dan Penuntasan Kekerasan Seksual, Intoleransi dan Perundungan</li> <li>Produksi konten kampanye anti Kekerasan Seksual, Intoleransi dan Perundungan (ILM, talkshow, webinar, lagu, infografis, web series, podcast, komik, video, animasi)</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
3	<b>Sosialisasi dan Advokasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Permendikbud Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, Intoleransi dan Perundungan</li> <li>Sosialisasi Program Perundungan Roots untuk UPT Kemendikbud dan Unit Utama</li> <li>Sosialisasi dan edukasi publik seputar topik toleransi maupun intoleransi</li> <li>Publikasi Konten di Media Sosial</li> <li>Penyusunan modul Pelatihan Anti Kekerasan Seksual, Intoleransi dan Perundungan</li> <li>Penyelenggaraan Webinar</li> <li>Advokasi kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota, Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya terkait Anti Kekerasan Seksual, Intoleransi dan Perundungan</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
4	<b>Pendampingan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan KSP dan Kemenpan RB terkait Portal LAPOR Pengaduan Kekerasan Seksual, Intoleransi dan Perundungan (Unit Layanan Terpadu)</li> <li>Penanganan Korban 3 dosa melalui Rumah Aman, Bantuan Psikologis, Pemetaan Strategis dan Tindakan medis</li> <li>Koordinasi dengan KPPPA dan KPAI terkait penanganan laporan kasus Kekerasan Seksual, intoleransi dan perundungan</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
5	<b>Bimbingan Teknis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bimtek Pemahaman dan Penanganan kekerasan seksual (Internal Puspeka, PTN, LLDIKTI, PTS dan LSM)</li> <li>Bimtek melalui Program Perundungan Roots SMA/K (Provinsi) dan SMP (Kab/Kota) kerja sama dengan Unicef</li> <li>Bimtek Pemahaman dan Penanganan intoleransi</li> </ul>
6	<b>Survei "3 Dosa Pendidikan"</b>



Tabel 6. Strategi Implementasi Inklusifitas dan Kebinekaan

KEGIATAN STRATEGI IMPLEMENTASI INKLUSIFITAS DAN KEBINEKAAN	
1	<b>Kajian Kebijakan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis dan <u>Pemetaan Kebijakan</u> Inklusifitas dan Kebinekaan</li> <li>Kajian konten Inklusifitas dan Kebinekaan</li> <li>Pengembangan Kebijakan Inklusifitas dan Kebinekaan</li> </ul>
2	<b>Produksi Konten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi Implementasi Inklusifitas dan Kebinekaan</li> <li>Produksi konten kampanye Inklusifitas dan Kebinekaan (ILM, talkshow, webinar, lagu)</li> <li>Monitoring dan <u>Evaluasi</u></li> </ul>
3	<b>Sosialisasi dan Advokasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Inklusifitas dan Kebinekaan</li> <li>Sosialisasi dan <u>edukasi publik seputar topik</u> Inklusifitas dan Kebinekaan</li> <li>Publikasi Konten melalui Media Sosial</li> <li>Penyusunan modul sosialisasi Inklusifitas dan Kebinekaan</li> <li>Penyelenggaraan Webinar</li> <li>Advokasi kepada <u>Dinas Pendidikan Kab/Kota, Provinsi dan pemangku kepentingan lainya</u> terkait Inklusifitas dan Kebinekaan</li> <li>Monitoring dan <u>Evaluasi</u></li> </ul>
4	<b>Pendampingan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan pada <u>Dinas Pendidikan Kab/Kota, Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya</u> terkait Inklusifitas dan Kebinekaan</li> <li>Monitoring dan <u>Evaluasi</u></li> </ul>
5	<b>Bimbingan Teknis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bimtek Pemahaman Inklusifitas dan Kebinekaan (Internal Kemdikbudristek)</li> <li>Bimtek Agen Penguatan Karakter</li> <li>Bimtek Pemahaman Inklusifitas dan Kebinekaan, Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat</li> </ul>
6	<b>Survei Inklusifitas dan Kebinekaan</b>

### C. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Pusat Penguatan Karakter, terdapat beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai dengan bidang tugas untuk periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

Tabel 7. Arah dan Kebutuhan Regulasi Pusat Penguatan Karakter

No.	erangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian
1.	Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain.
2	Revisi PP dan Permendikbud turunan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Dengan adanya penyesuaian pada UU No. 20 Tahun 2003 maka peraturan pelaksanaan dari UU akan ikut menyesuaikan.
3	Revisi Permendikbud 82 Tahun 2015 tentang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Menyesuaikan dengan implementasi kebijakan prioritas penanggulangan 3 Dosa Besar

### D. KERANGKA KELEMBAGAAAN

Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.





Gambar 12. Struktur Organisasi Pusat Penguatan Karakter

Tugas dan fungsi dari masing-masing Kelompok Kerja Pusat Penguatan Karakter seperti tabel di bawah ini.

<b>Kelompok 1</b>	<p><b>Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Penguatan Karakter</b>            Tugas penyiapan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.            Fungsi: (a) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter;            (b) Melaksanakan kebijakan di bidang penguatan karakter;            (c) Melaksanakan analisis konten penguatan karakter.</p>
<b>Kelompok 2</b>	<p><b>Kelompok Kerja Komunikasi Publik dan Fasilitasi Penguatan Karakter</b>            Tugas melaksanakan pelaksanaan penguatan karakter, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter            Fungsi: (a) Melaksanakan pembuatan konten penguatan karakter melalui media;            (b) Melaksanakan penguatan karakter melalui satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat;            (c) Melaksanakan koordinasi penguatan karakter;            (d) Melaksanakan penyebarluasan konten penguatan karakter melalui media sosial; dan            (e) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter.</p>
<b>Kelompok 3</b>	<p><b>Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Penguatan Karakter</b>            Tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter.            Fungsi: (a) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan karakter; dan            (b) Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan penguatan karakter.</p>

Tabel 8. Tugas dan Fungsi Kelompok di Pusat Penguatan Karakter



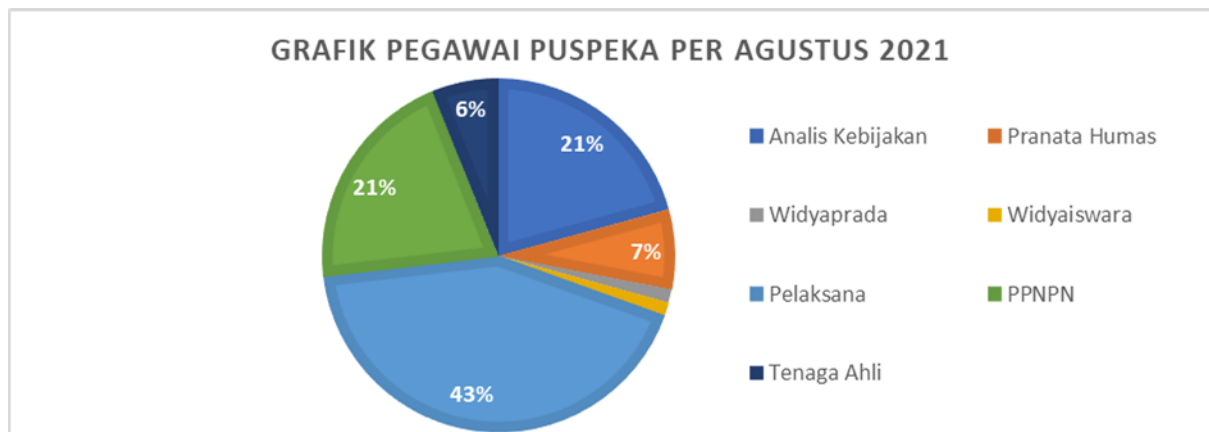
Berdasarkan analisis perhitungan beban kerja dan peta jabatan yang telah ditetapkan, Pusat Penguatan Karakter membutuhkan 147 orang PNS. Sedangkan saat dibentuknya PUSPEKA pada tahun 2020 jumlah pegawai yang ada di PUSPEKA sebanyak 84 orang, Pegawai PUSPEKA mutasi dari beberapa Satuan Kerja, dengan rincian dari Satker Pusat Analisis dan Sinkronisasi kebijakan 23 orang, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 10 orang, Direktorat Pendidikan Keluarga 49 orang, Pusat

Tahun 2020

Tahun 2021

BAGIAN	Es II	Es IV	Fgs. Tertentu	Fgs. Umum	Non PNS	JUMLAH
Kepala Pusat	1					1
Tata Usaha		1		20		21
Pokja Penyusunan Kebijakan Penguatan Karakter			11	9		20
Pokja komunikasi Publik dan Fasilitasi Penguatan Karakter			13	8		21
Pokja Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Penguatan Karakter			12	9		21
PPNPN					17	17
Tenaga Ahli/Eksternal					4	3
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>105</b>

BAGIAN	Es II	Es IV	Fgs. Tertentu	Fgs. Umum	Non PNS	JUMLAH
Kepala Pusat						
Tata Usaha		1		13		14
Pokja Penyusunan Kebijakan Penguatan Karakter			7	8		15
Pokja komunikasi Publik dan Fasilitasi Penguatan Karakter			10	7		17
Pokja Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Penguatan Karakter			9	5		14
PPNPN					17	17
Tenaga Ahli/Eksternal					4	2
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>81</b>



Pengembangan Perfilman 1 orang dan Direktorat Sekolah Menengah kejuruan 1 orang. Dalam perjalanan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini beberapa pegawai yang mutasi, Perubahan jumlah SDM pada tahun 2021, indikasinya adalah perpindahan pegawai sebanyak 24 orang. Hal ini disebabkan antara lain beberapa jabatan fungsional teknis yang tidak terakomodasi pada pekerjaan yang dilakukan di PUSPEKA, seperti Widyapra.

Gambar 13. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) PUSPEKA



## BAB IV TARGET KINERJA DAN TARGET PENDANAAN

### A. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan target kinerja guna mendukung tercapainya kebijakan penguatan karakter pada level nasional, telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai sebagai bentuk keberhasilan pencapaian (*outcome*) sebuah program. IKK ini sendiri merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dari sebuah kebijakan. PUSPEKA sendiri mengalami perubahan IKK pada tahun 2021 merujuk kepada perubahan di Renstra Kemendikbudristek yang juga mengalami perubahan dan mandat penuntasan dan pencegahan 3 (tiga) dosa besar pendidikan. Perubahan yang terjadi pada target sasaran yang pada awalnya adalah jumlah konten yang diproduksi dan disebarluaskan menjadi persentase kabupaten/kota.

SS, SP, SK dan IKK Tahun 2021-2024						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Baseline	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan Karakter) dan relevansi di seluruh jenjang	IKSS 2.3 Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim sekolah, dan indeks inklusivitas pada kategori baik	%	-	55	60	65
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Baseline	2022	2023	2024	
Meningkatnya Internalisasi nilai penguatan karakter	IKP 2.3.2 Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan	%	-	40	65	100
	IKP 2.3.3 Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	%	-	35	65	100
	IKP 2.3.4 Persentase provinsi/kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan	%	-	30	60	100
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	2022	2023	2024	
Terlaksananya Penguatan Karakter bagi Ekosistem pendidikan dan Kebudayaan	2.3.2.1 Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	Prov/Kab/Kota	-	219	356	548
	2.3.3.1 Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	Prov/Kab/Kota	-	191	356	548
	2.3.4.1 Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	Prov/Kab/Kota	-	164	328	548

PUSAT PENGUATAN KARAKTER 3

Tabel 9. Indikator Kinerja Pusat Penguatan Karakter Tahun 2021-2024

Tabel 10. Indikator Kinerja Pusat Penguatan Karakter Tahun 2022-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	2020	2022	2023	2024
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang						
IKSS 2.3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	%	-	-	28	30	33
SP	Persentase provinsi dan Kab/Kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan						
IKP 2.3.3	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	%	-	-	28	30	33
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan						
IKK 2.3.2.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	provinsi/Kab/Kota	-	-	219	356	548
IKK 2.3.3.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	provinsi/Kab/Kota	-	-	191	356	548
IKK 2.3.4.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	provinsi/Kab/Kota	-	-	164	328	548



IKK 2.3.5.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	provinsi/ Kab/Kota	-	-	328	548	8.161
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter						
IKK	Predikat Sakip Pusat Penguatan Karakter minimal A		-	-	BB	A	A
IKK	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal Sangat Baik		85	-	90,40	90,80	91,15

## B. TARGET PENDANAAN

Pada tahun 2020, PUSPEKA dialokasikan anggaran sebesar 249,3 M. Anggaran untuk produksi konten sebesar 17% dan untuk *placement* konten sebesar 31% serta pembiayaan terbesar ada di program Belajar dari Rumah (BDR) sebesar 32%. Bila dilihat, maka anggaran terbesar digunakan untuk produksi dan penyebarluasan konten sebesar 80%, sisanya untuk kegiatan pendukung produksi konten, evaluasi, dan survey persepsi serta dukungan manajemen.

Kemudian pada tahun 2021, ada perubahan anggaran sebesar 163.8 M, sehingga anggaran 2021 menjadi 85,5M. Hal ini disebabkan perubahan kebijakan untuk dana *placement* konten dan BDR dipindah ke Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM). Anggaran yang sudah terserap per 17 September 2021 sebesar 37,62%, sebagian diperuntukkan untuk produksi konten profil pelajar Pancasila, penuntasan 3 (tiga) dosa besar pendidikan, inklusivitas dan kebinekaan.

Perencanaan anggaran tahun 2022, ditetapkan pagu anggaran sebesar 56,2 M, ada penurunan sebesar 29.3 M dikarenakan pagu alokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengalami penurunan yang drastis. Akan tetapi, melihat kebutuhan anggaran untuk mencapai target yang sudah ditetapkan Pusat Penguatan Karakter mengusulkan penambahan anggaran sebesar 43,4 M dengan rincian penguatan karakter terkait profil pelajar Pancasila sebesar 10 M, pencegahan dan penuntasan 3 (tiga) dosa besar sebesar 27,9 M, dan penguatan karakter inklusivitas dan kebinekaan sebesar 4,6 M.

Kebutuhan pendanaan periode pertama dari tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagaimana tertuang pada Tabel 6 berikut:



No	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Alokasi (dalam ribuan)			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase provinsi/kab/kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan	31.198.620	69.170.351	72.628.872	76.260.316
2	Persentase provinsi/kab/kota yang mengimplementasikan materi perundungan, kekerasan seksual, intoleransi pada satuan pendidikan	26.260.820	31.323.717	32.889.902	34.534.397
3	Persentase Provinsi/kab/kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan	30.604.948	38.199.294	40.109.258	42.114.721
<b>Total Anggaran</b>		<b>88.064.388</b>	<b>138.693.362</b>	<b>145.628.032</b>	<b>152.909.434</b>

SANDINGAN ANGGARAN PUSPEKA T.A 2020, T.A 2021 DAN PAGU ANGGARAN T.A 2022							
PUSAT Penguatan Karakter	ANGGARAN T.A 2020		ANGGARAN T.A 2021		PAGU ANGGARAN T.A 2022		
	TARGET	ANGGARAN(Rp)	TARGET	ANGGARAN(Rp)	TARGET	ANGGARAN(Rp)	
Layanan Penguatan Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila	30 Konten	Rp138,0M	1 Layanan	Rp29,2M	6 Layanan	Rp16,4M	Anggaran Tusi T.A 2022 Rp44,5 Miliar
Layanan Penguatan Karakter Terkait iklim keamanan satuan pendidikan	30 Konten	Rp64,6M	1 Layanan	Rp20,3M	3 Layanan	Rp19,9M	
Layanan Penguatan Karakter Terkait inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan	24 Konten	Rp30,3M	1 Layanan	Rp24,1M	2 Layanan	Rp8,1M	
Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp9,1M	1 Layanan	Rp9,6M	1 Layanan	Rp10,3M	Anggaran Pendukung T.A 2022 Rp11,7 Miliar
Layanan Layanan Umum	1 Layanan	Rp5,3M	1 Layanan	Rp1,2M	1 Layanan	Rp1,0M	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Unit	Rp1,7M	2 Unit	Rp869Jt	2 Unit	Rp319Jt	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp 249,3M</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp 85,5M</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp 56,2M</b>	

Tabel 11. Perencanaan Anggaran Penguatan Karakter di PUSPEKA



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 disusun untuk mendukung program Kemendikbudristek dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter, yang menjadi fokus pemerintah pada RPJMN. Renstra menjabarkan kebijakan dan strategi pencapaian kinerja Pusat Penguatan Karakter, guna mencapai rencana sasaran kinerja dan program dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemendikbudristek. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penguatan Karakter ini diharapkan untuk digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan penguatan karakter yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi Unit Utama dan Satuan Kerja di Kemendikbudristek, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memandatkan Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud, dan OPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain yang diuraikan di atas, Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penguatan Karakter ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh komponen ekosistem pendidikan (Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat), serta khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu memperkuat karakter bangsa melalui ekosistem pendidikan selama lima tahun mendatang.





## Matrik Target Kinerja Program/Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Renstra Kemendikbudristek 2020-2024

Kode	Uraian	satuan	Baseline	Target			Alokasi (juta rupiah)		
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang								
IKSS 2.3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	%	-	28	30	33			
SP	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter								
IKP 2.3.2	Persentase provinsi dan Kab/Kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan	%	-	40	65	100	16.440	16.933	17.441
IKP 2.3.3	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	%	-	35	65	100	19.978	20.577	21.195
IKP 2.3.4	Persentase provinsi dan kab/kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan	%	-	30	60	100	8.161	8.406	8.658
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan								
IKK 2.3.2.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	provinsi/ Kab/Kota	-	219	356	548	16.440	16.933	17.441
IKK 2.3.3.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	provinsi/ Kab/Kota	-	191	356	548	19.978	20.577	21.195
IKK 2.3.4.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	provinsi/ Kab/Kota	-	164	328	548	8.161	8.406	8.658
IKK 2.3.5.1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	provinsi/ Kab/Kota	-	-	328	548	8.161	8.406	8.658
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter								
IKK 5.3.4.12	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	Predikat	-	BB	A	A	1.080	1.112	1.146

IKK 5.3.13.13	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	Nilai	85	90,45	90,8	91,15	10.627	10.946	11.274
------------------	---	-------	----	-------	------	-------	--------	--------	--------